



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon. (021) 3823033, 3822633

Faksimile. (021) 3823033, 3822633

Website : <http://bkddki.jakarta.go.id> Email : bkdprov@jakarta.go.id

JAKARTA

Kode Pos 10110

Nomor : 1489 / - 85.46

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Susulan
Proses Usulan Penghargaan
Satyalancana

Jakarta, 06 Maret 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
di-
Jakarta

Menindaklanjuti pemberitahuan nomor 371/-085.41 Tanggal 15 Januari 2018 tentang usulan Penghargaan Satyalancana, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 002.2/905/OTDA tanggal 2 Februari 2018 tentang Prosedur Penyampaian Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) agar setiap usulan SLKS diajukan dalam bentuk Microsoft Word dan Excel (contoh format terlampir) yang dikelompokkan berurutan berdasarkan yang tertinggi yaitu 30 tahun; 20 tahun; 10 tahun serta disusun berurutan berdasarkan pangkat tertinggi.

No. Urut	Nama/NIP	Pangkat/ Jabatan	Tanda Kehormatan yang Diusulkan
-------------	----------	---------------------	---------------------------------

2. Berkas kelengkapan usulan dalam bentuk format PDF (*softcopy*) yang terdiri dari:
 - SK CPNS, SK Jabatan dan Pangkat (dituliskan TMT-nya);
 - NIP baru;
 - Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan atasan langsung dengan mencantumkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat DRH dibuat (format terlampir).
3. Penyampaian berkas dalam bentuk *softcopy*:
 - Usulan dari UKPD ditujukan kepada Suku Badan Kepegawaian Daerah wilayah kota masing-masing;
 - Usulan dari SKPD ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

4. Batas waktu penerimaan usulan dalam bentuk *softcopy* untuk:

- Periode I bulan **Mei** diterima dari UKPD ke Suku Badan Kepegawaian Daerah Wilayah Kota paling lambat akhir **Oktober**, dari SKPD ke BKD paling lambat akhir **November** dan sebelum akhir **Desember** sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri RI;
- Periode II bulan **Agustus** diterima dari UKPD ke Suku Badan paling lambat akhir **Januari**, dari Suku Badan dan SKPD ke BKD paling lambat akhir **Februari** dan sebelum akhir **Maret** sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri RI;
- Periode III bulan **November** diterima dari UKPD ke Suku Badan paling lambat akhir **April**, dari Suku Badan dan SKPD ke BKD paling lambat akhir **Mei** dan sebelum akhir **Juni** sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri RI.

5. Ketentuan lainnya.

- Kepada PNS yang pernah terkena hukuman disiplin maka masa kerja dihitung sejak selesainya hukuman disiplin tersebut.
- Kepada PNS yang pernah mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN), maka masa cuti tidak dihitung sebagai masa kerja.
- Cara penghitungan masa hukuman disiplin sedang dan berat serta CTLN terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 22.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

H. Samsuddin Lologau
NIP. 195908051984091002

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Februari 2018

Nomor : 002.2/905/OTDA
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Hal : Prosedur Penyampaian Usulan
Tanda Kehormatan Satyalancana
Karya Satya

Yth. Sdr. Gubernur

di
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan surat Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan GTK Nomor: B-1719/Sesmilpres/GT.02.00/11/2017 tanggal 29 November 2017 Hal Prosedur Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Khusus untuk usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, demi kelancaran penyelesaian piagam dan petikan, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Format usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diajukan dalam bentuk *Microsoft word* dan *Microsoft Excel* (contoh format terlampir).
 - b. Usulan tanda kehormatan dikelompokkan berurutan berdasarkan Satyalancana Karya Satya yang tertinggi, yaitu 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun.
 - c. Usulan disusun berurutan berdasarkan pangkat tertinggi.
 - d. Penulisan gelar pendidikan menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang benar, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
2. Berkas kelengkapan usulan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam bentuk format PDF (*softcopy*), yang terdiri dari:
 - a. SK CPNS;
 - b. SK Jabatan Terakhir dan Pangkat Terakhir;
 - c. Konversi NIP Baru;
 - d. Daftar Riwayat Hidup yang ditanda tangan oleh yang bersangkutan dan atasan langsung dengan mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun saat dibuat (contoh format terlampir).Keseluruhan berkas/dokumen tersebut disatukan dalam satu folder untuk setiap nama yang diusulkan.
3. Batas waktu penerimaan berkas usulan dari Pemerintah Daerah oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah dibagi dalam 3 (tiga) periode, yaitu:
 - a. Periode I bulan **Mei**, diterima paling lambat akhir bulan Desember;
 - b. Periode II bulan **Agustus**, diterima paling lambat akhir bulan Maret;
 - c. Periode III bulan **November**, diterima paling lambat akhir bulan Juni.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengajuan usulan Satyalancana Karya Satya berpedoman pada surat Sekretaris Militer selaku Sekretaris Dewan GTK Nomor B-86/Sesmil/03/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Prosedur Pemberian GTK, sebagaimana dapat diunduh melalui situs Web Kementerian Sekretariat Negara RI (<http://www.setneg.go.id>).

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

[Signature]
Samarsono, MDM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan GTK.

Lampiran I

Nomor : 002.2/905/OTDA

Perihal : 2 Februari 2018

**FORMAT USULAN SATYALANCANA KARYA SATYA DALAM BENTUK
MICROSOFT WORD**

No.	Nama NIP	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang diusulkan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
dst.			

Lampiran III

Nomor : 002.2/905/OTDA

Perihal : 2 Februari 2018

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

Nama Lengkap	:
Tempat Lahir/ Tgl. Lahir	:
NIP	:
Pendidikan Terakhir	:
Pangkat/ Golongan ruang Terakhir	:
SK CPNS	:(No. dan Tanggal SK)
Jabatan Terakhir	:(No. dan Tanggal SK)
Jenis Kelamin	:
Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki	:(Nomor, tanggal dan Tahun Keppres)
Konversi NIP Baru	:
Hukuman Disiplin	:(Nomor, tanggal dan tahun dijatuhi hukuman TMT s.d. selesai)
CTLN	:(Nomor, tanggal, dan tahun CTLN)